

Pengaruh Partisipasi Pemuda dan Transparansi Pengelolaan APBDes Terhadap Good Governance Studi Kasus: pada Desa Golantepus Kecamatan Mejobo

¹Sherina Bella Marshanda, ²Bonnix Hedy Maulana, ³Sukma Wijayanti
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Pendidikan, dan Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus

E-mail: 42022070013@std.umku.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi pemuda dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap implementasi prinsip *good governance* pada pemerintahan Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, data diolah dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemuda berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* dengan koefisien regresi sebesar $H1 = 0,292$, nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Transparansi pengelolaan APBDes juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien $H2 = 0,306$, signifikansi $0,000 < 0,05$. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap *good governance* dengan nilai F sebesar 70,833 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,585 menunjukkan bahwa 58,5% variasi *good governance* dapat dijelaskan oleh model penelitian. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi generasi muda dan penguatan transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan faktor strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, dan responsif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan literatur akuntansi sektor publik serta implikasi praktis bagi perumusan kebijakan pemerintahan desa. Namun, penelitian ini terbatas pada satu lokasi serta menggunakan pendekatan berbasis persepsi responden, sehingga daya generalisasi hasil masih terbatas.

Kata kunci : *Partisipasi Pemuda, Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Desa, Good Governance, Pemerintahan Desa*

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of youth participation and transparency in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) on the implementation of good governance principles in the Government of Golantepus Village, Mejobo District, Kudus Regency. The research employed a quantitative approach with a correlational design to analyze the relationship between independent and dependent variables. Data were collected through Likert-scale questionnaires administered to 100 respondents selected using purposive sampling techniques. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 25. The results indicate that youth participation has a positive and significant effect on good governance, with a regression coefficient of 0.292 and a significance value of $0.000 < 0.05$. Transparency in APBDes management also has a positive and significant effect, with a regression coefficient of 0.306 and a significance value of $0.000 < 0.05$. Simultaneously, both variables significantly influence good governance, as evidenced by an F-value of 70.833 and a significance level of $0.000 < 0.05$. The Adjusted R Square value of 0.585 demonstrates that 58.5% of the variation in good governance can be explained by the research model. These findings confirm that

strengthening youth participation and enhancing transparency in village financial management are strategic factors in achieving participatory, accountable, and responsive village governance. This study contributes theoretically to the development of public sector accounting literature and provides practical implications for village governance policy formulation. However, the study is limited to a single research location and relies on perception-based data, thereby limiting the generalizability of the finding.

Keyword : *Youth Participation, Transparency in Village Budget Management, Good Governance, Village Governance*

1. PENDAHULUAN

Good governance menjadi salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada era otonomi daerah yang menuntut peningkatan kualitas tata kelola publik. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam pelaksanaan pemerintahan (UNDP, 1997). Sistem pemerintahan di Indonesia sampai pada level pemerintahan desa, relevansi prinsip tersebut semakin kuat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memperluas kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih terbuka dan bertanggung jawab guna meminimalkan penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. World Bank (1992) menekankan bahwa tata kelola yang baik berperan penting dalam mendukung efektivitas pembangunan dan pencegahan korupsi. Oleh sebab itu, penerapan *good governance* di tingkat desa menjadi faktor strategis dalam memastikan pengelolaan APBDes yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Meskipun regulasi telah mengamanatkan penerapan tata kelola yang baik, berbagai temuan empiris memperlihatkan bahwa implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Hasil kajian Maulana dan Wijayanti (2023) menunjukkan bahwa kompleksitas struktural dalam

penganggaran, pengaruh kepentingan politik, serta kurang memadainya manajemen risiko pada fase perencanaan dan pengalokasian anggaran daerah menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi kebijakan yang berpihak pada publik. Data yang dipublikasikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan dana desa masih termasuk dalam kategori penyimpangan keuangan publik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Selaras dengan hal tersebut, studi Wulandari dan Sujatmika (2024) mengemukakan bahwa walaupun transparansi dan akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, kualitas partisipasi masyarakat belum menunjukkan tingkat optimal. Transparansi pengelolaan APBDes menjadi prasyarat mendasar untuk mengurangi ketimpangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa. Fakta ini mengindikasikan bahwa keterbukaan administratif melalui penyediaan laporan keuangan belum secara otomatis diikuti oleh keterlibatan publik yang aktif dalam proses pengawasan maupun penentuan kebijakan pembangunan desa.

Keterlibatan publik yang aktif tidak hanya sebagai akses terhadap informasi administratif, melainkan diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi Pembangunan desa. Sejumlah studi

sebelumnya masih mengkatagorikan partisipasi masyarakat sebagai variabel agregatif yang diukur secara umum berdasarkan karakteristik sosial. Bilatula et al. (2023) dan Setyaningrum et al. (2024) mengoperasionalkan partisipasi dalam bentuk indikator tunggal atau indeks komposit tanpa diferensiasi menurut gender, usia, maupun status sosial ekonomi. Sementara itu, penelitian yang secara eksplisit menelaah kontribusi pemuda dalam tata kelola keuangan desa masih relatif terbatas. Padahal, generasi muda memiliki potensi strategis sebagai aktor pembangunan yang responsif terhadap perkembangan teknologi, kritis terhadap kebijakan publik, serta berperan sebagai agen transformasi sosial. Rahayu dan Santoso (2022) menegaskan bahwa partisipasi pemuda dalam forum musyawarah desa dan pemanfaatan media digital dapat memperluas aksesibilitas informasi publik sekaligus memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah desa. Oleh karena itu, pemuda berperan sebagai penggerak aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan desa, keterlibatan tersebut diwujudkan melalui penyampaian aspirasi Masyarakat, pengembangan gagasan inovatif, serta partisipasi dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. Peran ini umumnya terwujud melalui wadah kelembagaan kepemudaan, seperti Karang Taruna maupun organisasi lainnya yang berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini mengkaji secara spesifik interaksi antara partisipasi pemuda dan transparansi pengelolaan APBDes dalam memengaruhi implementasi good governance di tingkat desa. Konsep *good governance* menekankan prinsip partisipasi transparansi, dan akuntabilitas sebagai pilar utama tata Kelola pemerintahan yang

efektif (UNDP, 1977). Sejumlah penelitian terdahulu cenderung menjadikan aparatur desa sebagai responden utama, sehingga perspektif pemuda sebagai subjek partisipatif dalam proses tata kelola belum memperoleh perhatian yang memadai. Penelitian ini memberikan unsur kebaruan dalam beberapa dimensi. Pertama, penelitian ini menempatkan pemuda sebagai unit analisis utama dalam pengukuran kualitas partisipasi publik, bukan sekadar bagian dari populasi masyarakat secara umum. Kedua, penelitian ini menguji secara simultan pengaruh partisipasi pemuda dan transparansi pengelolaan APBDes terhadap *good governance* melalui pendekatan kuantitatif dengan model regresi linier berganda. Ketiga, penelitian ini dilaksanakan pada konteks Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, yang menunjukkan stabilitas realisasi anggaran desa namun disertai penurunan partisipasi pemuda dalam forum perencanaan. Konteks tersebut memberikan perspektif empiris yang relevan untuk memahami relasi antara keterbukaan administratif dan dinamika partisipasi generasi muda. Secara konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan desa dengan menekankan pentingnya diferensiasi aktor sosial dalam analisis partisipasi. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini berpotensi menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa dalam merancang strategi peningkatan transparansi serta penguatan keterlibatan pemuda secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi Pemuda

Partisipasi pemuda mengacu pada keterlibatan aktif anak muda dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan pembangunan, yang mencakup ruang

untuk berdialog, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan dan penilaian program yang mempengaruhi komunitas mereka. Dalam penelitian Sala-Torrent, M., & Planas-Lladó, A. (2024) partisipasi pemuda diilustrasikan sebagai bentuk interaksi antara anak muda dengan lembaga publik, di mana peran pekerja muda sangat penting untuk menghubungkan aspirasi dan kebutuhan mereka sehingga mereka dapat berkontribusi secara bermakna dalam tata kelola masyarakat.

Partisipasi pemuda dipahami sebagai keterlibatan generasi muda dalam forum musyawarah, penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan dan evaluasi. Secara teori, keterlibatan ini memperkaya informasi setempat, menumbuhkan rasa memiliki (*ownership*), dan memperkuat tanggung jawab baik kepada pemerintah maupun kepada sesama anggota (komunitas). Penemuan terbaru yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan dampak positif terhadap hasil pembangunan desa, hal ini menunjukkan bahwa hubungan partisipasi yang diisi secara aktif oleh pemuda dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengawasan di tingkat desa (Tuarita & Asthenu, 2023).

Meskipun partisipasi pemuda secara teoritis memiliki peran strategis dalam pembangunan desa, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan generasi muda dalam forum pembangunan belum optimal dan belum menunjukkan keberlanjutan yang memadai (Ilmar et.al., 2023). Partisipasi yang terjadi masih terbatas pada aspek kehadiran formal tanpa keterlibatan substantif dalam penyusunan rencana maupun pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa. Fenomena tersebut juga tercermin dalam konteks Desa Golantepus, di mana berdasarkan rekapitulasi daftar hadir musyawarah pembangunan, jumlah pemuda yang berpartisipasi lebih rendah dibandingkan

kelompok masyarakat lainnya. Fakta tersebut mengindikasikan adanya jarak antara potensi peran strategis pemuda dan realisasi keterlibatan mereka dalam sistem tata kelola desa.

Dalam konteks tata kelola keuangan desa, partisipasi pemuda tidak dapat dilepaskan dari aspek transparansi. Kedua variabel ini memiliki hubungan yang berpengaruh saling mendukung. Transparansi memberikan informasi yang diperlukan oleh pemuda agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif, di sisi lain, partisipasi menciptakan dorongan positif bagi pemerintah desa untuk terus membuka informasi dan memperbaiki proses anggaran. Bukti dari berbagai studi di desa juga menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi berhubungan dengan pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Hipotesis H1: Partisipasi pemuda (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap (Y) dalam tata kelola desa.

Transparansi Pengelolaan APBDes

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh David M. Konisky dan Steven E. Kraft (2020), transparansi merujuk pada kemampuan dalam melihat dan memahami proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi atau badan pemerintah. Transparansi dapat diwujudkan dengan memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang relevan dan akurat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Budiawan (2022) menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan dan kejujuran pemerintah terhadap masyarakat dengan memberikan akses terhadap informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Pemerintah desa memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menginformasikan pengelolaan sumber daya publik, baik berupa dana, kebijakan, maupun hasil kegiatan pembangunan. Transparansi ini menjadi instrumen penting dalam menjaga

kepercayaan publik terhadap aparaturnya pemerintahan.

Menurut Febrianti (2024), mengemukakan bahwa transparansi memiliki tiga indikator, yaitu:

1. Informatif yaitu penyampaian informasi yang jelas mengenai mekanisme atau sistem kerja, laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, serta dapat diakses oleh semua pihak.
2. Keterbukaan yaitu memberikan hak untuk memperoleh informasi kepada masyarakat umum.
3. Pengungkapan yaitu memberikan informasi kepada publik mengenai aktivitas dan kinerja keuangan dari hasil kegiatan yang dilakukan.

Transparansi dalam pengelolaan APBDDes merujuk pada transparansi informasi yang mencakup seluruh tahapan anggaran, dari tahap perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dengan adanya transparansi, masyarakat akan lebih mudah memahami alokasi, realisasi, dan manfaat dari kegiatan. Oleh karena itu, hal ini juga mengurangi ketidaksamaan informasi, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, serta memperkuat kontrol sosial. Dalam literatur desa di Indonesia, transparansi publik dengan akuntabilitas selalu dianggap sebagai syarat penting untuk pengelolaan APBDDes atau Alokasi Dana Desa yang efektif.

Hipotesis H2: Transparansi pengelolaan APBDDes (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance (Y).

Good Governance

Grand Theory yang melandasi penelitian ini adalah teori *Good Governance*, Tata Kelola yang baik atau *Good Governance* adalah istilah yang memiliki definisi beragam menurut berbagai ahli dan peneliti. *Good governance* adalah sebuah proses pengelolaan pembangunan yang kuat dan

dapat dipertanggungjawabkan, yang sesuai dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk menghindari kesalahan dalam alokasi dana investasi dan mencegah korupsi, baik dari segi politik maupun administratif, serta melaksanakan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan aktivitas bisnis. (Hamirul, 2020)

Namun secara keseluruhan, teori tata kelola yang baik atau *good governance* merujuk pada prinsip-prinsip dalam pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum. Prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam penyelenggaraan layanan publik untuk memperbaiki kinerja aparaturnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah menyusun prinsip-prinsip ini untuk mendorong perubahan positif dalam birokrasi demi menciptakan layanan publik yang lebih berkualitas.

Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dianggap sebagai penyelenggara urusan publik. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu langkah strategis untuk menerapkan tata kelola yang baik di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan layanan publik (Salam, 2023)

Negara yang mempunyai birokrasi pemerintahan diharuskan untuk mengubah cara layanan yang bersifat elit menjadi layanan yang lebih inklusif. Dalam hal ini, sektor swasta yang mengelola sumber daya di luar pemerintah juga perlu berperan dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Akhirnya, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik memerlukan keterlibatan organisasi masyarakat untuk menciptakan

keseimbangan antara negara dan warganya.

Ulfa et.al. (2025) menegaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berperan penting dalam membangun sistem pengelolaan organisasi yang transparan dan akuntabel. Mekanisme seperti dewan komisaris independen dan komite audit berfungsi memperkuat pengawasan terhadap kinerja lembaga, meningkatkan keterbukaan informasi, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pelaporan kinerja ekonomi, sosial, serta lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan Harjanti et.al. (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Cooperative Governance* melalui sistem pengendalian internal pada lembaga koperasi di Kudus telah menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan penting dalam tata kelola pemerintahan desa, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berperan besar dalam mewujudkan *Good Governance* yang responsif dan berkeadilan.

Good governance yang baik di tingkat desa mencakup pengelolaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, efisien, efektif, menaati hukum, dan berkeadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik (Huda, 2025). Dalam implementasinya, *good governance* yang baik terlihat dari proses perencanaan dan penganggaran yang transparan, pengawasan publik yang efektif, layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta konsistensi program desa dengan tujuan pembangunan yang lebih luas seperti SDGs. Penelitian nasional mengenai dana desa menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan pedesaan, kebijakan desentralisasi, terutama sejak 2015 dengan program dana desa,

menempatkan desa sebagai pelaksana utama program sosial dan ekonomi, sehingga mutu pengelolaan di desa menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan dan memerlukan arahan agar penggunaan dana lebih transparan dan sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Hipotesis H3: : Partisipasi pemuda (X1) dan transparansi pengelolaan APBDes (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap good governance (Y).

3. METODOLOGI

Bagian metode penelitian ini menguraikan secara terstruktur tahapan dan prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian, sehingga pembaca dapat memahami alur penelitian secara komprehensif serta memiliki peluang untuk mereplikasi prosesnya secara ilmiah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori korelasional, yang dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan serta menguji pengaruh variabel partisipasi pemuda dan transparansi pengelolaan APBDes terhadap implementasi prinsip *good governance* pada pemerintahan desa (Pebriyani, 2026).

Penelitian dilaksanakan di Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan empiris, yakni adanya kinerja realisasi anggaran desa yang relatif konsisten dalam dua tahun terakhir, namun disertai dengan penurunan tingkat keterlibatan pemuda dalam forum perencanaan pembangunan desa. Kondisi tersebut memberikan konteks yang relevan untuk menelaah keterkaitan antara transparansi anggaran, partisipasi generasi muda, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Pelaksanaan penelitian berlangsung pada

periode November 2025 hingga Februari 2026.

Populasi penelitian mencakup seluruh pemuda Desa Golantepus yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian (Alvin, 2023), meliputi aspek usia, domisili, keterlibatan dalam aktivitas desa, serta tingkat pendidikan minimal. Jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup dengan skala Likert lima tingkat untuk mengukur variabel partisipasi pemuda, transparansi pengelolaan APBDes, serta penerapan good governance. Di samping itu, data sekunder berupa dokumentasi laporan realisasi APBDes digunakan sebagai bahan pendukung guna memperkuat interpretasi hasil penelitian.

Sebelum analisis regresi dilakukan, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji kualitasnya melalui uji validitas menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas dengan *koefisien Cronbach's Alpha* untuk memastikan konsistensi internal dan ketepatan pengukuran. Tahap selanjutnya mencakup pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi, guna memastikan model regresi

memenuhi persyaratan statistik yang diperlukan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda melalui bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial menggunakan uji *t* dan secara simultan melalui uji *F*, sedangkan besaran kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen diukur melalui koefisien determinasi (R^2) (Pebriyani, 2026).

Seluruh tahapan penelitian dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, logis, serta metodologis guna menjamin validitas, reliabilitas, dan akuntabilitas hasil penelitian, sehingga temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menilai sejauh mana setiap pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan korelasi *Pearson*, yaitu dengan membandingkan nilai *r* hasil perhitungan dengan nilai *r* tabel untuk setiap butir pertanyaan pada masing-masing variabel. Apabila nilai *r* hitung > nilai *r* tabel, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Rangkuman hasil pengujian validitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Partisipasi Pemuda	X1.1	0,743	0,361	Valid
		X1.2	0,777	0,361	Valid
		X1.3	0,775	0,361	Valid
		X1.4	0,823	0,361	Valid
		X1.5	0,816	0,361	Valid
		X1.6	0,613	0,361	Valid

		X1.7	0,783	0,361	Valid
		X1.8	0,757	0,361	Valid
2	Transparansi Pengelolaan APBDes	X2.1	0,739	0,361	Valid
		X2.2	0,686	0,361	Valid
		X2.3	0,758	0,361	Valid
		X2.4	0,787	0,361	Valid
		X2.5	0,803	0,361	Valid
		X2.6	0,705	0,361	Valid
		X2.7	0,760	0,361	Valid
		X2.8	0,780	0,361	Valid
3	<i>Good Governance</i>	Y1.1	0,806	0,361	Valid
		Y1.2	0,671	0,361	Valid
		Y1.3	0,736	0,361	Valid
		Y1.4	0,782	0,361	Valid

Berdasarkan hasil pengujian validitas tabel diatas, seluruh item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini, baik pada variabel Partisipasi Pemuda, Transparansi Pengelolaan APBDes, maupun *Good Governance*, dinyatakan memenuhi kriteria validitas. Hal ini terlihat dari nilai r hitung $>$ nilai r tabel sebesar 0,361, sehingga seluruh butir pernyataan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai tingkat keandalan suatu instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti secara konsisten. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* sebagai indikator konsistensi internal antaritem pernyataan. Variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian reliabilitas masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Partisipasi Masyarakat	0,891	Reliabel
2	Transparansi Pengelolaan APBDes	0,889	Reliabel
3	<i>Good Governance</i>	0,738	Reliabel

Hasil uji reliabilitas memperlihatkan bahwa seluruh variabel yang dianalisis dalam penelitian ini memenuhi kriteria keandalan karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Variabel Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pengelolaan APBDes menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik dengan nilai masing-masing sebesar 0,891 dan 0,889, sedangkan variabel *Good Governance* dengan nilai 0,738 juga berada dalam kategori reliabel. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya untuk mengumpulkan data secara konsisten dan layak digunakan

dalam tahapan analisis lanjutan, termasuk pengujian hipotesis penelitian.

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan tahap awal dalam pengolahan data penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik variabel yang diteliti. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi kondisi umum data berdasarkan nilai minimum dan maksimum, menghitung nilai rata-rata sebagai indikator kecenderungan pusat data, serta menilai tingkat penyebaran

jawaban responden melalui standar deviasi. Selain itu, distribusi data dianalisis menggunakan ukuran *skewness* dan *kurtosis* guna mengetahui pola kemiringan dan tingkat keruncingan distribusi, sehingga dapat dipahami apakah data cenderung simetris dan mendekati distribusi normal. Informasi yang diperoleh dari analisis deskriptif menjadi dasar penting dalam menilai kualitas data serta menentukan kelayakan untuk dilakukan analisis statistik lanjutan, seperti pengujian hipotesis atau analisis regresi.

	N Statistic	Range Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Sum Statistic	Mean		Std. Deviation Statistic	Variance Statistic	Skewness		Kurtosis	
						Statistic	Std. Error			Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Partisipasi Pemuda (X1)	100	19	15	34	2452	24,52	,423	4,227	17,868	-,100	,241	-,315	,478
Transparansi Pengelolaan APBDes (X2)	100	21	14	35	2335	23,35	,424	4,239	17,967	,200	,241	-,261	,478
Good Governance (Y)	100	11	7	18	1239	12,39	,239	2,391	5,715	,001	,241	-,498	,478
Valid N (listwise)	100												

Gambar 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, seluruh variabel dalam penelitian ini diolah dari 100 responden (N = 100). Variabel Partisipasi Pemuda (X1) menunjukkan nilai terendah sebesar 15 dan nilai tertinggi sebesar 34, dengan rentang skor 19. Nilai rata-rata sebesar 24,52 mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi pemuda berada pada kategori relatif tinggi. Standar deviasi sebesar 4,227 memperlihatkan adanya variasi tanggapan responden yang berada pada tingkat moderat. Nilai skewness sebesar -0,100 menunjukkan distribusi data yang relatif seimbang (simetris), sementara nilai kurtosis sebesar -0,315 mengarah pada pola distribusi yang mendekati normal.

Pada variabel Transparansi Pengelolaan APBDes (X2), diperoleh nilai minimum 14 dan maksimum 35 dengan rentang 21. Rata-rata sebesar 23,35 menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap tingkat transparansi tergolong cukup baik. Standar deviasi sebesar 4,239 mencerminkan tingkat

penyebaran data yang hampir sebanding dengan variabel partisipasi pemuda. Nilai skewness sebesar 0,200 menunjukkan kecenderungan distribusi yang sedikit mengarah ke kanan, namun masih dalam batas toleransi normalitas. Sementara itu, kurtosis sebesar -0,261 mengindikasikan distribusi yang relatif normal.

Adapun variabel *Good Governance* (Y) memiliki nilai minimum 7 dan maksimum 18 dengan rentang sebesar 11. Nilai rata-rata 12,39 menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* berada pada kategori cukup baik. Standar deviasi sebesar 2,391 mengindikasikan tingkat variasi jawaban yang lebih rendah dibandingkan variabel independen. Nilai *skewness* sebesar 0,001 menunjukkan distribusi yang sangat simetris, sedangkan kurtosis sebesar -0,498 menggambarkan pola distribusi yang masih berada dalam kategori normal.

Secara keseluruhan, nilai skewness dan kurtosis dari seluruh variabel berada dalam rentang ± 1 , yang menandakan bahwa distribusi data tidak mengalami

penyimpangan yang signifikan dan memenuhi asumsi normalitas untuk dilakukan analisis statistik lanjutan.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi memenuhi asumsi distribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas menggunakan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan memperhatikan nilai signifikansi yang diperoleh. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas disajikan dalam tabel berikut:

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,57087067
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,052
	Negative	-,051
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang melebihi tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Nilai statistik uji sebesar 0,052 juga mengindikasikan bahwa selisih antara distribusi empiris dengan distribusi normal teoritis masih berada dalam batas toleransi. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi dan model regresi dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya, termasuk pengujian asumsi klasik lainnya serta pengujian hipotesis.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)* sebagai dasar pengambilan keputusan. Model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinieritas apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil pengujian multikolinieritas disajikan dalam tabel berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2,423	1,313		-1,846	,068		
X1	,292	,041	,474	7,109	,000	,943	1,061
X2	,306	,040	,505	7,570	,000	,943	1,061

a. Dependent Variable: Y

Gambar 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas, diketahui bahwa seluruh variabel bebas dalam model regresi memiliki nilai *tolerance* kurang lebih dari 0,10 serta nilai *variance inflation factor (VIF)* kurang lebih dari 10, yakni masing-masing sebesar 0,943 untuk nilai *tolerance* dan 1,061 untuk nilai VIF pada variabel X1 dan X2. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinieritas, sehingga hubungan antarvariabel independen tidak menunjukkan korelasi yang tinggi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi multikolinieritas dan dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan pada

setiap pengamatan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah uji Glejser dengan dasar pengambilan keputusan melalui nilai signifikansi. Apabila nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka model

regresi dinyatakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,139	,807		3,892	,000		
	X1	-,024	,025	-,098	-,946	,346	,943	1,061
	X2	,009	,025	,040	,381	,704	,943	1,061

a. Dependent Variable: ABS_RES

Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Glejser, diperoleh nilai signifikansi pada seluruh variabel independen yang melebihi 0,05 dengan X1 (Partisipasi Masyarakat) 0,346 > 0,05 dan X2 (Transparansi Pengelolaan APBDes) 0,704 > 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa varians residual pada setiap pengamatan bersifat konstan, sehingga asumsi homoskedastisitas dalam analisis regresi telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengidentifikasi arah hubungan serta mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui metode ini, pengaruh beberapa variabel bebas dapat dianalisis secara bersamaan terhadap satu variabel terikat. Hasil pengujian regresi linear berganda dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2,423	1,313		-1,846	,068		
	X1	,292	,041	,474	7,109	,000	,943	1,061
	X2	,306	,040	,505	7,570	,000	,943	1,061

a. Dependent Variable: Y

Gambar 5 Hasil Analisis Linier Berganda

Sehingga diperoleh persamaan :

$$Y = -2,423 + 0,292X_1 + 0,306X_2 + \varepsilon$$

Hasil analisis regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar -2,423 mengindikasikan bahwa apabila variabel Partisipasi Pemuda dan Transparansi Pengelolaan APBDes

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \varepsilon$$

bernilai nol, maka tingkat Good Governance diperkirakan sebesar – 2,423.

- b. Variabel Partisipasi Pemuda (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,292 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance. Artinya, semakin tinggi keterlibatan pemuda, maka semakin meningkat pula penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Variabel Transparansi Pengelolaan APBDes (X_2) juga menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,306 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang menandakan bahwa transparansi pengelolaan anggaran

desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance.

Uji F (Simultan)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi pada taraf 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka seluruh variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1843,639	2	921,820	70,833	,000 ^b
	Residual	1262,361	97	13,014		
	Total	3106,000	99			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Gambar 6 Hasil Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil diatas, diperoleh nilai F sebesar 70,833 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Pemuda (X_1) dan Transparansi Pengelolaan APBDes (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Good Governance (Y).

Uji T (Parsial)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai signifikansi pada setiap variabel bebas dengan batas 0,05. Apabila nilai signifikansi berada di bawah 0,05, maka variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilainya melebihi 0,05, maka variabel tersebut dianggap tidak memiliki pengaruh. Hasil uji t dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2,423	1,313		-1,846	,068		
	X1	,292	,041	,474	7,109	,000	,943	1,061
	X2	,306	,040	,505	7,570	,000	,943	1,061

a. Dependent Variable: Y

Gambar 7 Hasil Uji T (Parsial)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), dapat diketahui bahwa:

- Variabel Partisipasi Pemuda (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis H1 dinyatakan diterima. Hal ini menandakan bahwa tingkat partisipasi pemuda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Good Governance (Y).
- Variabel Transparansi Pengelolaan APBDes (X2) juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah taraf signifikansi 0,05, sehingga hipotesis H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, kedua variabel bebas dalam penelitian ini secara parsial terbukti memengaruhi variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan indikator *Adjusted R Square*. Nilai ini mencerminkan tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat setelah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas yang digunakan. Semakin besar nilai *Adjusted R Square*, maka semakin besar pula kontribusi variabel independen terhadap

variabel dependen. Adapun hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) disajikan dalam tabel berikut:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,770 ^a	,594	,585	3,60750

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Gambar 8 Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel Model Summary, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,585. Temuan ini menunjukkan bahwa sebesar 58,5% variasi pada variabel *Good Governance* (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Partisipasi Pemuda (X1) dan Transparansi Pengelolaan APBDes (X2) dalam model regresi, sementara sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,770 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki daya jelaskan yang cukup baik terhadap perubahan pada variabel *Good Governance*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Partisipasi Pemuda terhadap Good Governance

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat dinyatakan bahwa partisipasi pemuda memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerapan prinsip *good governance* di Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari batas signifikansi nilai alpha 0,05 serta pengujian ini memiliki pengaruh positif yang ditunjukkan dari hasil pengujian regresi sebesar 0,292. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima. Nilai koefisien regresi yang bersifat positif mengindikasikan bahwa peningkatan keterlibatan pemuda dalam aktivitas pemerintahan desa sejalan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemuda memegang peran strategis dalam mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal tersebut diperkuat oleh karakteristik responden, di mana sebagian besar responden berada pada rentang usia produktif 17–38 tahun dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif memadai. Kondisi tersebut memungkinkan pemuda untuk memahami proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan desa secara lebih kritis dan rasional.

Selain itu, tingkat partisipasi pemuda paling dominan ditemukan dalam kegiatan musyawarah desa yang berfungsi sebagai forum utama dalam proses pengambilan keputusan publik di tingkat desa. Keterlibatan pemuda melalui musyawarah desa, aktivitas karang taruna, maupun kegiatan gotong royong berkontribusi secara langsung dalam penyaluran aspirasi masyarakat serta memperkuat fungsi pengawasan sosial terhadap kinerja aparatur desa. Kehadiran pemuda dalam berbagai kegiatan tersebut mendorong peningkatan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu, partisipasi pemuda tidak

hanya bersifat simbolis, melainkan menjadi instrumen nyata dalam memperkuat prinsip-prinsip *good governance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan kelompok usia produktif dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan publik serta efektivitas pengawasan pemerintahan. Selain itu, temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sembiring *et al.* (2026) yang menyatakan bahwa partisipasi pemuda berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* dalam pemerintahan desa.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan APBDes terhadap Good Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* di Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo. Pernyataan tersebut dibuktikan melalui pengujian yang menunjukkan nilai signifikansi variabel transparansi pengelolaan APBDes sebesar 0,00 berada di bawah nilai alpha sebesar 0,05 serta pengujian ini berpengaruh positif yang ditunjukkan dari hasil pengujian regresi sebesar 0,505, sehingga hipotesis kedua (H2) dapat diterima. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan anggaran desa, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan desa merupakan unsur fundamental dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan hasil analisis, Desa Golantepus menunjukkan kinerja keuangan yang relatif stabil dan

efektif, di mana realisasi pendapatan desa pada tahun 2023 dan 2024 mampu mencapai bahkan mendekati target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut tidak terlepas dari penerapan prinsip transparansi dalam penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat.

Transparansi pengelolaan APBDes memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui secara terbuka proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Keterbukaan informasi tersebut memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Dengan demikian, transparansi berperan penting dalam memperkuat prinsip akuntabilitas dan efektivitas, karena aparatur desa terdorong untuk mengelola anggaran secara lebih hati-hati dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori transparansi publik yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, temuan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhartini dan Sari (2020) serta Hidayati dan Prasetyo (2022), yang menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan APBDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* di tingkat pemerintahan desa.

Pengaruh Partisipasi Pemuda dan Transparansi Pengelolaan APBDes secara Simultan terhadap Good Governance

Berdasarkan hasil pengujian simultan melalui uji F, dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemuda dan transparansi pengelolaan APBDes secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* di Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo. Nilai signifikansi uji F sebesar 0,00 yang lebih kecil dari

signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa kedua variabel independen tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* tidak dapat dicapai secara optimal apabila hanya bertumpu pada satu faktor saja. Transparansi pengelolaan APBDes berperan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, sementara partisipasi pemuda memastikan bahwa informasi tersebut dimanfaatkan secara aktif dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan publik. Sinergi antara kedua variabel tersebut membentuk mekanisme kontrol sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Desa Golantepus, meskipun transparansi pengelolaan APBDes telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat penurunan tingkat partisipasi pemuda dalam forum musyawarah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penguatan partisipasi pemuda masih perlu ditingkatkan. Transparansi tanpa partisipasi berpotensi hanya bersifat administratif, sedangkan partisipasi tanpa transparansi akan kehilangan dasar informasi yang memadai. Oleh karena itu, kolaborasi antara partisipasi pemuda dan transparansi pengelolaan APBDes menjadi faktor kunci dalam mewujudkan *good governance* yang efektif dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep *good governance* yang menempatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan pemerintahan desa.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh partisipasi pemuda dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap implementasi prinsip *good governance* pada Pemerintahan Desa Golantepus. Berdasarkan hasil pengujian empiris, diperoleh bukti bahwa kedua variabel tersebut, baik secara individual maupun secara simultan, memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi keterlibatan generasi muda dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa, yang didukung oleh sistem keterbukaan informasi keuangan yang memadai, merupakan determinan strategis dalam mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, dan responsif. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi pemuda dan transparansi pengelolaan APBDes, maka kualitas implementasi prinsip *good governance* di tingkat desa akan semakin kuat dan optimal.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat kerangka *good governance* yang menempatkan partisipasi masyarakat dan transparansi sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik dengan menyoroti pentingnya diferensiasi aktor sosial khususnya pemuda dalam analisis tata kelola pemerintahan desa.

Dari sisi praktis, temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa perlu merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan peningkatan transparansi anggaran dengan strategi pemberdayaan dan pelibatan pemuda secara sistematis dan berkelanjutan. Sinergi antara akses informasi yang

terbuka dan partisipasi aktif generasi muda berperan penting dalam memperkuat legitimasi publik serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, A. (2023). Analisis kuantitatif dengan teknik purposive sampling dalam penelitian sosial. *Edu Komputika Journal*.
- Bilatula, R., Yusuf, N., Mahmud, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 326-335.
- Budiawan, F. P. (2022). Understanding the implementation of good government: Etika, akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pelayanan publik. *JAFM*, 3(2), 115–124.
- Febrianti, A.M. & Afiah, M.S.N. (2024) – *Jurnal Sains Riset*
- Hamirul, A. (2020). *Good governance dalam perspektif kualitas pelayanan publik*. Pustaka Learning Center.
- Harjanti AE, Setiawan D, Lestari P. (2022) Penerapan Good Cooperative Governance melalui sistem pengendalian internal pada koperasi di Kudus. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Hidayati, N., & Prasetyo, B. (2022). Pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap good governance dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 4(1), 45–58.
- Huda, A. J. P. (2025). Penerapan prinsip good governance pada

- pemerintahan desa. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 13(1), 1–12.
- Ilmar, A., Kusuma, A. J., Wahidin, D. T. S., Iswahyuni, & Efianda, A. (2023). Partisipasi politik anak muda dalam pembangunan desa di Kabupaten Indramayu (Studi pada Desa Pabean Udik). *Jurnal Pemerintahan Indonesia*, 5(1), 15–28.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). Laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2022.
- Maulana, B. H., & Wijayanti, S. (2023). Tantangan dilema penganggaran untuk pengentasan kemiskinan di pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Internasional Sinergi*, 1(2), 88–102.
- Pebriyani, D. (2026). Pengaruh transparansi, target anggaran, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi di pemerintahan nagari Kabupaten Padang Pariaman). *Jambura Accounting Review*, 7(1).
- Rahayu, S., & Santoso, H. (2022). Peran Pemuda dalam Meningkatkan Transparansi Pemerintahan Desa Melalui Media Digital. *Jurnal Komunikasi dan Pemberdayaan*, 4(1), 22–33.
- Salam, R. (2023). Improving Public Services in Realizing Good Governance in Indonesia.
- Sala-Torrent, M., & Planas-Lladó, A. (2024). *Enhancing youth voices: Exploring community participation through youth workers*. *Children and Youth Services Review*, 160, Article 107600.
- Sala-Torrent, M., & Planas-Lladó, A. (2024). *Enhancing youth voices: Exploring community participation through youth workers*. *Children and Youth Services Review*, 160, 107579.
- Sembiring, W. M., Ginting, F. P. P., Siregar, M. H., Hidayat, B., & Abdullah, T. (2026). Transformasi potensi pemuda dalam mendukung tata kelola desa partisipatif di Kabanjahe Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 7(1), 223–236.
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 3(3).
- Suhartini, T., & Sari, P. (2020). Transparansi pengelolaan keuangan desa dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 112–125.
- Tuarita, M. N. S., & Astheny, J. R. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan pada Dusun Sarimadu Negeri Tulehu. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(1).
- Ulfa R, Harjanti AE, Wijayanti S. Pengaruh Good Corporate Governance, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sustainability report. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- World Bank (1992). *Governance and Development*.
- Wulandari, N. A., & Sujatmika. (2024). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (Studi empiris di Kecamatan Sampung, Ponorogo).

*JEMAK: Jurnal Ekonomi,
Manajemen, dan Akuntansi Kreatif,
3(1), 19–30.*

